



Good Governance dalam Islam: Kepemimpinan dalam Islam

Alifah Nur Sulistiawati^{1*}, Rahma Lia Amanda², Tiara Rahmawati³, Puspita Anjar Any⁴

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia

alifahs507@gmail.com¹, rahmaliaamanda198@gmail.com², tiararahmawati1925@gmail.com³, puspitaanjar72@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: alifahs507@gmail.com*

Abstract. *Leadership in Islam, highlighting its ethical and pragmatic foundations. Good governance in Islam is deeply rooted in the principles of al-amanah (trustworthiness) and al-'adalah (justice), which are not only administrative norms but also moral and spiritual obligations. Leadership in Islam is understood as a sacred mandate carried out by the caliph, imam, and ulil amri, each of which has spiritual, moral, and executive dimensions. Prophetic qualities in the form of shidq (honesty), amanah (trustworthiness), fathonah (intelligence/wisdom), and tabligh (accurate delivery/communication) are ethical foundations that are inseparable from effective leadership. The qualifications of a Muslim leader are very diverse, ranging from faith, noble morals, justice, knowledge, courage, and devotion in public service. The way of government of the Prophet Muhammad SAW was inclusive and tolerant. The period of the Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Uthman, and Ali) shows how government administration developed, even though it was full of challenges. This history proves that the principles of good governance in Islam remain strong, even in difficult times.*

Keywords: *Leadership, Government, Governance*

Abstrak. Kepemimpinan dalam Islam, menyoroti landasan etika dan pragmatismenya. Tata pemerintahan yang baik dalam Islam berakar kuat pada prinsip-prinsip al-amanah (kepercayaan) dan al-'adalah (keadilan), yang bukan hanya norma administratif tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. Kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai amanah suci yang dijalankan oleh khalifah, imam, dan ulil amri, yang masing-masing memiliki dimensi spiritual, moral, dan eksekutif. Kualitas kenabian berupa shidq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), fathonah (kecerdasan/kebijaksanaan), dan tabligh (penyampaian/komunikasi yang akurat) merupakan landasan etika yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan yang efektif. Kualifikasi seorang pemimpin muslim sangat beragam, mulai dari keimanan, akhlak mulia, keadilan, ilmu pengetahuan, keberanian, dan pengabdian dalam pelayanan publik. Cara pemerintahan Nabi Muhammad SAW bersifat inklusif dan toleran. Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) menunjukkan bagaimana administrasi pemerintahan berkembang, meskipun penuh dengan tantangan. Sejarah ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam tetap kokoh, bahkan di masa-masa sulit sekalipun.

Kata kunci : Kepemimpinan, Pemerintahan, Tata Kelola

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang berkualitas merupakan pelaksanaan tata kelola negara yang kuat dan penuh tanggung jawab, serta berjalan dengan efisien dan efektif. Ini melibatkan penciptaan interaksi yang positif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, yang mengedepankan aspirasi rakyat dan nilai-nilai yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Proses tata laksana dalam pemerintahan yang baik merupakan seperangkat langkah yang diterapkan oleh organisasi, baik di sektor swasta maupun publik, untuk mengambil keputusan. Meskipun penerapan tata laksana pemerintahan yang baik mungkin tidak sempurna, setidaknya jika dijalankan dengan komitmen, hal ini dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan

praktik korupsi. Mewujudkan pemerintahan yang baik adalah kunci kesuksesan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang ada. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan aparatur negara yang berkualitas yang mampu mendukung terbentuknya pemerintahan yang bertanggung jawab dan mencerminkan nilai serta prinsip pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik, atau tata pemerintahan yang baik, telah menjadi isu universal dan mendesak di abad ke-21. Fenomena ini muncul sebagai respon terhadap maraknya sistem pemerintahan yang korup dan tidak efektif di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Secara umum, *good governance* dipahami sebagai pemerintahan yang bersih, di mana masyarakat menghormati hukum dan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini mencakup institusi publik yang efisien, terbuka, transparan, dan akuntabel di semua tingkatan.

Penekanan pada "pemerintahan yang bersih" dan "penghormatan terhadap hukum" sebagai pencapaian universal bagi kemajuan nasional menggarisbawahi aspirasi global yang sama. Dengan membingkai pembahasan melalui lensa ini, laporan ini segera membangun kesamaan pijakan sebelum menyelami perspektif Islam secara spesifik. Ini menunjukkan relevansi universal dari topik tersebut. Berangkat dari konteks global, laporan ini menempatkan tata pemerintahan Islam yang baik bukan sebagai konsep yang terlindungi, melainkan sebagai model yang relevan dan berpotensi unggul untuk mengatasi tantangan tata kelola pemerintahan yang bersifat universal. Pendekatan ini memungkinkan laporan untuk menarik audiens akademis yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Apa Dasar *Good Governance* dalam Islam, Bagaimana Konsep Kepemimpinan dalam Islam dan Prinsip-Prinsipnya, Apa Saja Karakteristik Pemimpin yang Ideal dalam Islam, Bagaimana Relevansi Konsep Kepimpinan Islam terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* Modern, Siapa Saja Teladan Kepemimpinan dalam Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *Good Governance*

Konsep *good governance* telah menjadi permasalahan global yang mendesak di era modern ini, muncul sebagai reaksi terhadap prevalensi sistem pemerintahan yang korup dan tidak efisien, khususnya di negara-negara berkembang. Secara umum, *good governance* dimengerti sebagai pemerintahan yang bersih, di mana masyarakat menghormati hukum dan birokrasi yang terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini mencakup institusi publik yang

bekerja dengan efisien, terbuka, transparan, dan bertanggung jawab di semua tingkatan. Penekanan pada "pemerintahan yang bersih" dan "pembelajaran hukum" menegaskan aspirasi global yang sama untuk kemajuan suatu bangsa.

Istilah *governance* sendiri, meskipun sering diartikan serupa dengan "pemerintahan" (*government*) dalam kamus, memiliki makna yang lebih luas. *Governance* adalah pengembangan dari konsep *government*, karena di dalam *governance* terdapat pemahaman bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor lainnya di luar pemerintah, termasuk masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dianggap tidak memadai dalam menghadapi berbagai kompleksitas masyarakat, sehingga peran *good governance* sangat penting untuk mendistribusikan kekuasaan pemerintah secara adil kepada masyarakat (Anwar, 2007). Dalam konteks tata kelola, pemerintah berfungsi sebagai salah satu pelaku dan tidak selalu sebagai pengambil keputusan. Terdapat tiga komponen yang setara dalam *governance* yang saling mengawasi untuk mencegah eksploitasi, yaitu pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat, meskipun dalam praktiknya, peran pemerintah masih lebih mendominasi karena meningkatnya permasalahan.

Nilai-nilai yang menghargai keinginan rakyat dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kapasitas rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan yang berkelanjutan, dan keadilan sosial. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, *Good Governance* berfokus pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam mencapainya. Dari sudut pandang pemerintah, *Good Governance* dapat dicermati melalui kebijakan hukum, perlindungan hak kebebasan sosial, politik, dan ekonomi, kompetensi dalam administrasi dan transparansi, desentralisasi, serta penciptaan pasar yang kompetitif.

Teori Kepemimpinan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan dianggap sebagai amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat yang dipimpin maupun di hadapan Allah SWT. Konsep ini berakar dari keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah Allah di bumi, dengan kewajiban untuk mengelola, memakmurkan, dan merawat bumi sesuai petunjuk Allah, serta memimpin dan membimbing orang lain untuk beribadah kepada Allah dan mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Kepemimpinan adalah amanah yang sangat besar dan berat, yang tidak dapat ditanggung oleh makhluk lain (QS Al-Ahzab: 72).

Tujuan utama kepemimpinan dalam Islam adalah melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia dengan mendorong kebaikan dan mencegah keburukan.

Ciri-ciri dan syarat seorang pemimpin dalam Islam sangat dipengaruhi oleh ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin Muslim diharapkan memiliki tidak hanya kemampuan manajerial, tetapi juga moral dan integritas spiritual yang tinggi. Karakter-karakter kenabian dari Nabi Muhammad SAW menjadi contoh utama, yaitu:

- **Shidq (Kejujuran):** Seorang pemimpin harus jujur, tulus, dan serius dalam sikap, kata-kata, serta pelaksanaan tugasnya, dengan kesesuaian antara yang dinyatakan dan yang dilakukan.
- **Amanah (Dapat Dipercaya):** Seorang pemimpin harus mampu mempertahankan kepercayaan yang diberikan padanya, mencakup integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang penuh.
- **Fathonah (Cerdas/Bijak):** Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, mampu mengenali kondisi yang ada, membuat keputusan yang benar, mengendalikan emosi, serta memiliki pengetahuan yang luas.
- **Tabligh (Menyampaikan/Komunikasi yang Jelas):** Seorang pemimpin perlu dapat menyampaikan informasi dan kebijakan dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat, tanpa menyembunyikan fakta, untuk membangun kepercayaan dan transparansi.

Selain karakteristik kenabian, syarat penting lain yang harus dimiliki oleh pemimpin Islam termasuk iman dan takwa kepada Allah SWT, mempunyai akhlak yang baik, bersikap adil dalam mengambil keputusan, profesional, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, jujur, memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam, berdedikasi untuk melayani masyarakat, berani dan tegas, mencintai kebenaran dan mengutamakan musyawarah (syura), mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, memiliki daya tarik karisma dan ketahanan, berkemampuan menegakkan hukum, serta mampu memotivasi dan membimbing orang lain sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis.

Tanggung jawab seorang pemimpin Muslim meliputi kewajiban dalam melaksanakan tugas (ibadah dan sosial), menjaga amanah dalam menerima tanggung jawab (kejujuran dan menjauhi penipuan), bersikap adil dalam pengambilan keputusan (tanpa diskriminasi dan keberpihakan), memberikan perlindungan (melindungi dan membimbing masyarakat), serta bersikap akuntabel (bertanggung jawab di hadapan Tuhan). Pandangan yang berlandaskan Ihsan juga memberikan alternatif baru untuk mencapai tata kelola yang baik dengan menekankan kasih sayang dan keindahan dalam tindakan, yang pada akhirnya bertujuan untuk

mendorong kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, pembangunan yang berkelanjutan, serta budaya tanggung jawab dan ketakwaan.

3. METODE PENELITIAN

Menganalisis konsep Good Governance dan kepemimpinan dalam Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan buku. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dasar Good Governance dalam Islam, memaparkan konsep kepemimpinan dan prinsip-prinsipnya, menganalisis relevansi kepemimpinan Islam terhadap Good Governance modern, dan menyajikan keteladanan kepemimpinan dalam Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Good Governance dalam Islam

Good governance tidak terbatas hanya pada pengelolaan birokrasi pemerintah, tetapi mencakup pengelolaan yang lebih luas, termasuk pengelolaan lembaga pemerintah dan instansi swasta, terutama yang terkait dengan layanan publik. Istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, dan istilah lengkapnya adalah *good corporate governance*. Oleh karena itu, istilah *governance* lebih tepat jika diartikan sebagai tata kelola. Namun, penting untuk diapresiasi bahwa istilah *good governance* lebih sering digunakan dalam konteks perbincangan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif. Ini juga disebabkan oleh dominasi analisis tentang peran institusi dalam pembangunan yang lebih banyak membahas mengenai peran negara.

Dalam definisi kamus, istilah “pemerintahan” dan “tata kelola” sering kali dianggap memiliki makna yang serupa, yaitu metode penerapan kekuasaan dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. Pemerintahan juga merujuk pada nama yang diberikan kepada suatu entitas yang mengelola kekuasaan pemerintahan di sebuah negara.

Konsep *governance* merupakan perluasan dari konsep *government*, karena di dalam *governance* terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan aktoraktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat luas sebagai stakeholders. Dari sinilah adanya anggapan bahwa pemerintah dirasakan tidak memadai dalam menyelesaikan kompleksitas yang ada di masyarakat, sehingga di sinilah letak pentingnya peran *good governance* untuk membagi otoritas pemerintah dengan masyarakat secara proporsional (Anwar, 2007).

Tata kelola dipahami sebagai sistem, praktik, dan prosedur yang digunakan oleh pemerintahan dan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan menyelesaikan berbagai isu publik. Dalam kerangka tata kelola, pemerintah hanya berfungsi sebagai salah satu pelaku dan tidak selalu sebagai pihak yang menjadi penentu.

Dalam *governance* ada 3 komponen yang sejajar, setara, saling mengontrol, untuk menghindari terjadinya eksploitasi satu terhadap lainnya, yaitu: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam realisasinya peran pemerintah masih lebih dominan. Karena permasalahan yang ditangani cenderung makin meningkat *Governance* semula diartikan pemerintahan, kemudian berkembang dan populer dengan sebutan pemerintahan. Secara konseptual pengertian *good* (baik) dalam istilah *Good Governance* (pemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman:

- Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud

Oleh karena itu dapat dikatakan *Good Governance* berorientasikan pada 2 hal pertama yaitu pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional. Hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Dari aspek pemerintah (government), *Good Governance* dapat dilihat melalui aspek- aspek:

- Kebijakan Hukum, perlindungan kebebasan sosial, politik, ekonomi
- Kompetensi administrasi dan transparansi.
- Desentralisasi
- Penciptaan pasar yang kompetitif

Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Konsep kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan mereka yang dipimpin dan di hadapan Allah SWT. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat antar sesama manusia, tetapi kepada Allah SWT. Tujuan utama kepemimpinan dalam Islam adalah untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan duniawi dengan mendorong kebaikan dan mencegah keburukan.

Konsep Kepemimpinan sebagai Amanah

Manusia diciptakan sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, dengan tanggung jawab untuk memakmurkan, mengelola, dan memelihara bumi sesuai dengan ketentuan Allah. Peran ini melibatkan memimpin dan membimbing orang lain penyembahan Allah dan membawa kebaikan menuju umat manusia. Kepemimpinan adalah amanah yang sangat besar dan berat, yang tidak dapat ditanggung oleh makhluk lain (QS Al-Ahzab: 72).

Kualifikasi Esensial bagi Seorang Pemimpin Islam

Seorang pemimpin Islam harus memiliki kombinasi kualifikasi spiritual, moral, dan intelektual/praktis. Kualifikasi ini meliputi:

- Beriman dan Bertakwa kepada Allah SWT: Fondasi utama bagi pelaksanaan tugas pimpinan, karena seorang pemimpin yang bertakwa akan selalu mengingat bahwa semua tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
- Memiliki Akhlak yang Mulia: Pemimpin harus memperlakukan rakyatnya dengan kasih sayang, berlaku adil, dan mengutamakan kesejahteraan umat.
- Adil dalam Memutuskan Perkara: Pemimpin harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambilnya tidak diskriminatif, tidak memihak, dan sesuai dengan norma-norma keadilan yang diatur dalam ajaran Islam.
- Amanah dan Jujur: Pemimpin harus menjalankan amanah dengan integritas dan kejujuran, menghindari korupsi, dan membangun kepercayaan masyarakat.
- Berilmu dan Memiliki Kemampuan Memimpin: Pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, pengetahuan tentang berbagai bidang (terutama agama dan tata kelola pemerintahan), dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana.
- Berdedikasi Mengabdikan pada Masyarakat: Pemimpin harus aktif berkontribusi dan melayani kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas tanpa melihat peluang untuk keuntungan pribadi.
- Berani dan Tegas: Pemimpin harus memiliki keberanian untuk melindungi bangsa dan rakyatnya dari musuh, tidak takut mengambil keputusan yang tidak populer, dan menegakkan nilai-nilai ilahi.
- Cinta Kebenaran dan Musyawarah: Pemimpin harus mencintai kebenaran dan berusaha membimbing rakyat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka harus berpandangan terbuka dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan bersama.

Tanggung Jawab Seorang Pemimpin Muslim

Seorang pemimpin Muslim memiliki tanggung jawab yang luas, meliputi aspek spiritual dan duniawi. Tanggung jawab ini mencakup:

- **Kewajiban Tugas yang Diemban:** Melaksanakan kewajiban, baik yang bersifat ibadah maupun sosial, seperti menegakkan keadilan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga keamanan.
- **Amanah dalam Menerima Amanat:** Menyadari bahwa amanat adalah kepercayaan dari Allah dan masyarakat, serta jujur dalam segala tindakan dan perkataan, menghindari penipuan seperti korupsi.
- **Adil dalam Mengambil Keputusan:** meninjau setiap keputusan tidak diskriminatif, tidak memihak, dan sesuai dengan norma keadilan Islam.
- **Mengayomi (Melindungi dan Membimbing):** Memahami kondisi masyarakat, ekonomi, dan politik untuk membuat keputusan yang bijaksana, serta membimbing dan melindungi masyarakat dari ancaman atau ketidakadilan, termasuk memperhatikan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
- **Akuntabilitas:** Semua kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

Melindungi Agama dan Mengatur Kehidupan Duniawi: Membimbing masyarakat menuju kebaikan dan mencegah keburukan:

- **Karakteristik Pemimpin dalam Islam**

Karakteristik pemimpin dalam Islam ditanamkan kuat pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang memandang kepemimpinan sebagai sebuah amanah dan tanggung jawab besar. Seorang pemimpin Muslim diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga integritas moral dan spiritual yang tinggi.

Berikut adalah ciri-ciri utama seorang pemimpin dalam Islam:

- **Sifat-sifat Kenabian sebagai Fondasi Etis:** Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah model utama dalam Islam, yang diubah oleh empat sifat dasar:
- **Shidq (Kejujuran):** Seorang pemimpin harus jujur, tulus, dan sungguh-sungguh dalam sikap, perkataan, dan pelaksanaan tugas. Hal ini berarti adanya konsistensi antara apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan, serta menjadi landasan untuk mencegah perlindungan kekuasaan.
- **Amanah (Dapat Dipercaya):** Pemimpin harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan, baik dalam tugas negara maupun kehidupan bermasyarakat. Amanah

mencakup integritas, kejujuran, dan tanggung jawab penuh, karena seorang pemimpin adalah pengemban amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

- Fathonah (Kecerdasan/Kebijaksanaan): Pemimpin harus cerdas dan bijaksana, mampu memahami situasi, mengambil keputusan yang tepat, dan mengelola emosi dengan baik, terutama saat menghadapi tantangan. Ini juga berarti memiliki pengetahuan yang luas.
- Tabligh (Menyampaikan/Komunikasi yang Benar): Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi dan kebijakan kepada publik secara jujur dan transparan, tanpa menyembunyikan kebenaran. Ini krusial untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan antara pemimpin dan rakyatnya.

Kualifikasi Esensial Lainnya:

Selain sifat-sifat kenabian, seorang pemimpin Islam juga harus memiliki kualifikasi penting lainnya:

- Beriman dan Bertakwa kepada Allah SWT: Ini adalah fondasi utama, karena pemimpin yang bertakwa akan selalu menyadari bahwa semua tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
- Memiliki Akhlak yang Mulia: Pemimpin harus memperlakukan rakyatnya dengan kasih sayang, berlaku adil, dan mengutamakan kesejahteraan umat.
- Adil dalam Memutuskan Perkara: Pemimpin harus memastikan setiap keputusan yang diambil tidak diskriminatif, tidak memihak, dan sesuai dengan norma keadilan Islam.
- Profesional: Pemimpin harus kompeten dan selalu mengutamakan kepentingan orang yang dipimpinnya, menggunakan otoritas untuk melayani, bukan mendominasi.
- Sehat Jasani dan Rohani, Jujur, serta Memiliki Kemampuan: Pemimpin harus sehat secara fisik dan mental, jujur, serta memiliki wawasan luas dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin secara efektif.
- Berdedikasi Mengabdikan pada Masyarakat: Pemimpin harus secara aktif berkontribusi dan melayani kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas tanpa mencari keuntungan pribadi.
- Berani dan Tegas: Pemimpin harus memiliki keberanian untuk melindungi bangsa dan rakyatnya dari musuh, tidak takut mengambil keputusan yang tidak populer, dan menegakkan nilai-nilai ilahi.

- Cinta Kebenaran dan Musyawarah: Pemimpin harus mencintai kebenaran, berpandangan terbuka, dan mengutamakan musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan bersama.
- Mampu Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Pemimpin harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan mendengarkan suara rakyat.
- Kharismatik dan Tangguh: Pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang karismatik, tegas, dan tangguh.
- Mampu Menegakkan Hukum: Pemimpin harus mampu menegakkan hukum berdasarkan kebenaran (al-Haq) dan tidak mengikuti keinginan pribadi.
- Mampu Mengarahkan dan Memotivasi: Pemimpin harus mampu mengarahkan dan memotivasi perilaku orang lain, serta menciptakan kerja sama yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis

Relevansi Konsep Kepemimpinan Islam Terhadap Good Governance

Good Governance adalah konsep yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Berikut adalah relevansi antara kepemimpinan Islam dan Good Governance:

Akuntabilitas dan Transparansi:

- Kepemimpinan Islam: Konsep amanah dalam Islam menuntut pertanggungjawaban yang tinggi dari seorang pemimpin, baik kepada rakyat maupun kepada Allah SWT. Ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Good Governance. Selain itu, sifat tablig (menyampaikan) mendorong transparansi dalam setiap kebijakan dan informasi publik, sebagaimana para Khalifah dahulu yang selalu terbuka terhadap rakyatnya.
- Good Governance: Menekankan pentingnya akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparansi (keterbukaan informasi) dalam setiap tindakan pemerintahan.

Partisipasi Masyarakat:

- Kepemimpinan Islam: Prinsip musyawarah (syura) adalah inti dari pengambilan keputusan dalam Islam. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat atau perwakilan mereka dalam urusan publik, selaras dengan prinsip partisipasi dalam Good Governance.
- Good Governance: Mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Keadilan dan Kesetaraan:

- Kepemimpinan Islam: Keadilan adalah nilai fundamental dalam Islam. Pemimpin dituntut untuk berlaku adil kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Ini juga mencakup jaminan kesamaan akses terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan administratif.
- Good Governance: Mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.

Efisiensi dan Efektivitas:

- Kepemimpinan Islam: Konsep "meninggalkan hal-hal yang tidak berguna" (HR at-Tirmizi, Ahmad) dapat diturunkan menjadi asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Pemimpin yang fathanah (cerdas) akan memastikan sumber daya digunakan secara optimal.
- Good Governance: Berupaya mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara historis, model tata kelola Nabi Muhammad SAW menunjukkan inklusivitas dan toleransi. Era Khulafaur Rasyidin, meskipun penuh tantangan, memberikan contoh nyata evolusi administrasi negara yang canggih, mulai dari konsolidasi (Abu Bakar), institusionalisasi dan reformasi (Umar), unifikasi (Utsman), hingga perjuangan menegakkan keadilan di tengah konflik (Ali). Pelajaran dari sejarah ini menegaskan ketahanan prinsip-prinsip *good governance* Islam bahkan dalam kondisi sulit.

Dalam konteks modern, masyarakat Muslim menghadapi tantangan seperti westernisasi, korupsi, dan kurangnya pemahaman etika Islam. Namun, terdapat peluang besar melalui pemanfaatan teknologi, demokratisasi, munculnya pemimpin visioner, dan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka modern. Filosofi berbasis *Ihsan* menawarkan jalan baru untuk mencapai *good governance* dengan menekankan kasih sayang dan keindahan tindakan. Pada akhirnya, *good governance* Islam bertujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan budaya tanggung jawab serta ketakwaan, yang menciptakan siklus kebajikan antara pemimpin dan rakyat.

DAFTAR REFERENSI

- Etika kepemimpinan dalam perspektif Islam. (n.d.). E-Journal STAI Ma'had Al-Hikmah. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/evaluasi/article/download/972/pdf/3030>
- Good governance according to Islamic perspective. (n.d.). Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/727>
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Usman bin Affan. (n.d.). Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/fatimahmutiarazzahra/5e4ffdbd541df4b9505eb62/kebijakan-ekonomi-pada-masa-khalifah-usman-bin-affan>
- Kebijakan pemerintahan di masa Khalifah Utsman bin Affan. (n.d.). Kumparan. <https://kumparan.com/berita-terkini/kebijakan-pemerintahan-di-masa-khalifah-utsman-bin-affan-1wXtbgCQrkY>
- Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an. (n.d.). Jurnal STIE Trianandra. <https://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jsr/article/download/1765/1493>
- Konsep kepemimpinan Islam (studi komparatif Al-Qur'an dan Hadis). (n.d.). <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter/article/download/615/653/3372>
- Masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. (n.d.). Jurnal HIJ. <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/HIJ/article/download/811/1192>
- Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari tahun 655–660 M. (n.d.). Jazirah: Jurnal Sosial dan Budaya Islam. <https://e-jazirah.com/index.php/jazirah/article/view/82/45>
- Mujahidin, A. (2016, April 18). Islam dan kepemimpinan: Sebuah catatan untuk pemimpin dan calon pemimpin Muslim. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska). <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>
- Pedoman memilih pemimpin dalam Islam, syarat pokok ini wajib dimiliki. (n.d.). Dompot Dhuafa. <https://www.dompotdhuafa.org/memilih-pemimpin-dalam-islam/>
- Pemimpin ideal dalam cahaya Al-Qur'an. (n.d.). Pusat Republikasi. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Akhlak/article/download/390/434/2028>
- Prinsip keadilan sosial dalam Islam: Studi teks Al-Qur'an dan Hadis. (n.d.). <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jinnsa/article/view/1048/675>
- Putri, A. H., & Az, A. J. (n.d.). Etika kepemimpinan dalam kitab Tibr Masbuk Fi Nashihat Al-Mulk karya Imam Al-Ghazali. Repository UIN Raden Fatah Palembang. <https://repository.radenfatah.ac.id/30665/1/JURNAL%20ARANDITA.pdf>
- Sifat pemimpin ideal menurut Rasulullah. (n.d.). Asamuslim. <http://asamuslim.id/berita/detail/3-sifat-pemimpin-ideal-menurut-rasulullah>